

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memiliki lapangan pekerjaan, terlindung dari pengangguran, dan memperoleh kehidupan yang layak merupakan hak yang tidak dapat dicabut dari seseorang sebagai martabat manusia atas kemerdekaan. Hak ini diakui oleh setiap orang di dunia sehingga diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Bahkan diakui sebagai hak yang utama dalam *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights* yang telah diratifikasi Indonesia tahun 2005. Di Indonesia pengakuan akan hak tersebut tersurat dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara implisit kebijakan tersebut menunjuk pada seluruh warga negara termasuk warga negara yang menyandang disabilitas, namun ditegaskan kembali serta diatur lebih terperinci dalam Undang-Undang No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Berbagai kebijakan dan pengaturan tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara termasuk disabilitas ternyata belum dapat tercapai dengan optimal, Fakta di lapangan menunjukkan tingkat pengangguran terbuka bagi orang yang dianggap “normal” di Indonesia sebanyak 5,70 persen (*Badan Pusat Statistik*). Tunadaksa sebagai individu yang memiliki keadaan fisik motorik yang berbeda dengan orang lain pada umumnya tentunya memiliki situasi yang lebih kompleks untuk memperolehnya, hal tersebut terlihat dari data Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dimana sampai dengan tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas mencapai 11.580.117 orang dimana tunadaksa sebanyak 3.010.830

orang, sedangkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja disabilitas pada tahun 2010 mencapai 7.126.409 orang dimana tunadaksa 1.852.866 (*nasional.kompas.com*). Data lain menyebutkan dari 20 juta disabilitas di Indonesia, sebanyak 80% atau 16 Juta orang tercatat tidak memiliki pekerjaan yang diantaranya 63% atau hampir sepuluh juta penyandang cacat yang tidak bekerja justru berada pada usia produktif atau angkatan kerja (*edukasi.kompas.com*). Selain itu *International Labour Organization* (ILO) merilis bahwa sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas pekerjaan yang layak. disabilitas juga tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan di setiap negara, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau secara lebih luas dalam aspek keuangan *non-moneter* seperti standar hidup misalnya pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan, Selain itu hampir sebanyak 785 juta perempuan dan laki-laki dengan disabilitas berada pada usia kerja, namun mayoritas dari mereka tidak bekerja. Mereka yang bekerja umumnya memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan para pekerja yang *non-disabilitas* dalam perekonomian informal dengan perlindungan sosial yang minim atau tidak sama sekali. Meskipun demikian para penyandang disabilitas kerap kali terkucil dari pendidikan, pelatihan kejuruan, dan peluang kerja (*www.ilo.org/jakarta*)

Upaya mewujudkan cita-cita luhur untuk melindungi warga negara dari pengangguran dan agar memperoleh kehidupan yang layak dilakukan berbagai pihak dalam rangka *akselerasi* pembangunan bangsa. Pemerintah merupakan salah satu pihak yang secara *proaktif* mewujudkannya. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang dipercaya dapat mewujudkannya sebagaimana dipaparkan Saduloh (2011, hlm.55) yakni “Pendidikan adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang berlangsung sepanjang hayat” sehingga pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan gencar diberikan melalui pendidikan formal maupun non formal yang diberikan bagi disabilitas. Pendidikan formal bagi tunadaksa diberikan

sebagaimana anak lain pada umumnya melalui pendidikan setara SD, SMP, hingga SMA. Mata pelajaran Pravokasional atau program khusus rehabilitasi vokasional diberikan di sekolah menengah bagian tunadaksa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, bahkan pendidikan bagi tunadaksa ditegaskan Frances P. Connor bertujuan mempersiapkan masa depan siswa (Widati, 2010). Konsep pendidikan semacam ini telah menjadi prioritas dalam pendidikan bagi remaja yang memiliki hambatan perkembangan, dimana memaksakan kemampuan akademik saja tidak memberikan dampak yang optimal dalam peningkatan kualitas hidupnya, hal tersebut mendorong Departemen Pendidikan Khusus di Amerika sejak tahun 1977 memperkasai guru dan instruktur bagi program pendidikan karir. (Miller&Schloss, 1982, hlm.9)

Konsep pendidikan karir seperti yang dipaparkan di atas di Indonesia masih dipercaya dapat memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. Mahabbati (2013) memaparkan ukuran keberhasilan pendidikan khusus yang meliputi kemandirian personal, *integrasi* sosial, pilihan-pilihan hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi diri sendiri. Beliau juga memaparkan Model kebijakan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit muatan akademik, dan berganti dengan pendidikan kecakapan hidup. Hal tersebut pun ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa BAB V Pasal 7 memaparkan Pendirian satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah program rehabilitasi dimana dijelaskan kembali dalam peraturan selanjutnya bahwa yang dimaksud rehabilitasi adalah rehabilitasi sosial, medis, dan vokasional. Sehingga sekolah khusus tingkat menengah memberikan mata pelajaran khusus seperti rehabilitasi vokasional ataupun mata pelajaran pravokasional sebagai upaya membekali keterampilan agar mampu mengikuti program vokasional pada jenjang selanjutnya atau siap bekerja maupun membuka lapangan pekerjaan secara mandiri pasca sekolah.

Menyelenggarakan layanan pendidikan yang memberikan pembekalan kecakapan hidup yang diantaranya kecakapan vokasional tentu saja tidak dapat diselenggarakan begitu saja oleh lembaga pendidikan formal, terdapat berbagai kendala yang ditemui diantaranya berdasarkan penelitian yang dilakukan Miller, Sabatino, & Larsen dalam (Miller, 1982, hlm.9) mayoritas guru sekolah biasa, guru pelatihan kejuruan, dan pendidik-pendidik khusus hanya memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang kebutuhan para penyandang keterbatasan, jenis-jenis program yang dibutuhkan, bagaimana mengintegrasikan komponen-komponen yang beragam dengan kurikulum SMA, jenis strategi yang harus digunakan, dan bagaimana meyakinkan penyandang keterbatasan usia remaja untuk memilih pendidikan yang tepat. Selain itu Seringnya program vokasional di sekolah khusus memisahkan program vokasional dari layanan pendidikan yang berbasis akademik, padahal secara operasional mereka saling bergantung dan keberhasilan program ini bergantung pada *efisiensi* keduanya. Berbagai kendala tersebut mengingatkan bahwa memberikan layanan pendidikan bagi tunadaksa merupakan hal yang tidak dapat dipandang mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan yang diantaranya perancangan program yang akan diberikan, persiapan guru yang kompeten dalam berbagai keterampilan dan output seperti apa yang ingin dihasilkan. Dengan kata lain, penting di sekolah khusus untuk merencanakan suatu program vokasional yang *terintegrasi* dimana didalamnya mengandung komponen akademis, peningkatan keterampilan, *eksplorasi* karir, membuat program dan bahan pelajaran, pelatihan bekerja, dan evaluasi program. Tentu saja hal ini perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan harapan serta membutuhkan gambaran model penyelenggaraan pelatihan vokasional yang diselenggarakan lembaga lain agar layanan pravokasional berkesinambungan dengan layanan vokasional, maupun dimaksudkan agar pasca sekolah menengah, ABK memiliki gambaran dan siap bekerja seperti siswa lain pada umumnya yang tidak berkesempatan menempuh pendidikan tinggi.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terkait layanan vokasional bagi tunadaksa dimulai sejak peneliti memasuki tahun kedua

menempuh perkuliahan, di mana di tahun kedua pelaksanaan study, peneliti menemukan fenomena terkait penyelenggaraan pendidikan khusus yakni kemandirian pasca sekolah yang kerap kali menjadi masalah dilematis yang dialami keluarga dengan ABK. Pasca sekolah, orang tua kebingungan menetapkan karier bagi anaknya, program layanan rehabilitasi vokasional melalui mata pelajaran pravokasional atau program khusus vokasional yang diberikan di SLB belum menggambarkan masa depan yang cerah bagi siswa, kerap kali pasca sekolah siswa kembali ke keluarga dan tidak mandiri secara finansial. Padahal upaya pendidikan yang diberikan untuk memberikan harapan masa depan dan kualitas hidup yang lebih baik. Melalui pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dalam berbagai mata kuliah yang menugaskan penulis untuk melakukan observasi dan wawancara maupun penggalan data lainnya penulis menyadari akan pentingnya layanan sekolah memberikan jaminan akan masa depan siswa, sehingga pada semester selanjutnya penulis memilih mata kuliah Pendidikan ABK pasca sekolah untuk memperkaya pengetahuan penulis mengenai fakta kehidupan anak berkebutuhan khusus pasca sekolah dan apa saja yang perlu diantisipasi di sekolah sebelum siswa turun dalam kehidupan yang sebenarnya pasca sekolah. dari hasil wawancara penulis dengan responden tunadaksa alumni SLB terungkap kekecawaan alumni yang mengungkapkan bahwa sekolah kurang mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri secara finansial meskipun terdapat program rehabilitasi vokasional namun pada penyelenggaraannya program tidak diawali identifikasi pasar yang serius, belum secara optimal membangun kemitraan dengan perusahaan atau lembaga maupun individu potensial tentang pemasaran, perekrutan kerja, maupun manajemen dan modal sehingga produk atau hasil belajar memiliki nilai jual rendah, sulit dipasarkan, sulit bersaing dengan produk buatan orang lain pada umumnya sehingga pasca sekolah tidak ada ketertarikan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya pada mata kuliah dalam program *spesialisasi* tunadaksa yakni mata kuliah Rehabilitasi *Psiko-fiskal* peneliti mendapat gambaran tentang layanan rehabilitasi vokasional bagi tunadaksa yang diberikan untuk

mempersiapkan tunadaksa mandiri secara finansial pasca sekolah. Mata kuliah tersebut menugaskan penulis untuk melakukan observasi lapangan kepada lembaga rehabilitasi vokasional. Atas rekomendasi dosen yang bersangkutan penulis memperoleh informasi tempat layanan vokasional bagi tunadaksa yakni NVRC / BBRVBD Cibinong. Dalam kesempatan tersebut penulis melakukan observasi di NVRC cibinong.

NVRC adalah sebuah lembaga yang dirancang sebagai pusat rehabilitasi vokasional *modern* dan sebagai rujukan tertinggi pelayanan rehabilitasi sosial serta vokasional bagi penyandang disabilitas di Indonesia. selain itu, lembaga ini pun dapat memfasilitasi warga masyarakat *disabilitas* untuk mengoptimalkan kemampuannya. NVRC juga sebagai Pusat Penelitian Pengembangan Sistem Rehabilitasi Sosial dan Vokasional. NVRC setiap tahunnya merekrut penyandang disabilitas lulusan SD/ SLTP/ SLTA untuk diberikan Pembelajaran keterampilan, wirausaha, dan penyaluran kerja yang disesuaikan dengan kemampuan setiap peserta didik. Berbagai program peningkatan sumber daya manusia diberikan kepada peserta didik melalui Program Rehabilitasi Vokasional berupa pelatihan vokasional yang meliputi Jurusan komputer, Jurusan penjahitan, Jurusan desain grafis/percetakan, Jurusan Elektronika, Pekerjaan logam, dan Jurusan otomotif.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan pelaksanaan study peninjauan atau *grand tour question*. Peneliti melakukan observasi dan memeriksa dokumen yang menggambarkan pelaksanaan layanan vokasional di NVRC Cibinong pada enam jurusan di NVRC yakni penjahitan, elektronika, design grafis, komputer, otomotif, dan pekerjaan logam. Dari hasil study peninjauan terdapat berbagai hal yang penulis temukan bahwa mayoritas tunadaksa yang mengalami hambatan *moderate* seperti siswa dengan *cerebral palsy* mengikuti pelatihan jurusan komputer maupun *design grafis*, hal tersebut dikarenakan dalam jurusan menjahit, pekerjaan logam, elektronika dan otomotif biasanya dilakukan oleh tunadaksa yang mengalami kebutuhan khusus ringan seperti

club-foot, club-hand, syndactylism, cretinism, congenital hip dislocation, congenital amputation (amputee), erb palsy, poliomyelitis, dan flat feet.

Berdasarkan pertimbangan yang ada dari hasil study peninjauan atau *grand tour question* peneliti memutuskan untuk memfokuskan dan mendalami layanan vokasional pada jurusan komputer di lapangan melalui penelitian yang berjudul “**PELAKSANAAN LAYANAN REHABILITASI VOKASIONAL KOMPUTER BAGI TUNADAKSA** (Study deskriptif pada jurusan komputer di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa/ *National Vocational Rehabilitation Centre Cibinong*)”

B. FOKUS MASALAH

Pada penelitian ini peneliti memilih pelaksanaan layanan rehabilitasi vokasional jurusan komputer di NVRC untuk didalami, sehingga terdapat pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah proses perencanaan layanan rehabilitasi vokasional jurusan komputer bagi siswa tunadaksa?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan layanan rehabilitasi vokasional jurusan komputer bagi tunadaksa?
3. Bagaimanakah proses evaluasi layanan rehabilitasi vokasional jurusan komputer bagi siswa tunadaksa?
4. Bagaimanakah proses *follow up* layanan rehabilitasi vokasional bagi siswa tunadaksa?

C. TUJUAN

1. Memperoleh gambaran proses perencanaan layanan rehabilitasi vokasional jurusan komputer bagi siswa tunadaksa.

2. Memperoleh gambaran proses pelaksanaan layanan rehabilitasi vokasional jurusan komputer bagi siswa tunadaksa.
3. memperoleh gambaran proses evaluasi layanan *rehabilitasi* vokasional jurusan komputer bagi siswa tunadaksa.
4. Memperoleh gambaran proses *follow up* layanan rehabilitasi vokasional jurusan komputer bagi siswa tunadaksa.

D. MANFAAT

1. Sebagai bahan referensi pengembangan model layanan vokasional bagi sekolah khusus dalam pelaksanaan program rehabilitasi vokasional atau mata pelajaran pravokasional.
2. Pedoman bagi guru dan orangtua dalam pengarahan siswa atau anaknya dalam bidang pekerjaan yang lebih spesifik untuk mempersiapkan masa depan tunadaksa menuju kehidupan yang mandiri secara finansial.
3. Rujukan bagi siswa tunadaksa di SMA-LB untuk memilih karier yang akan ditekuni pasca sekolah.